

TINJAUAN BUKU

POLITIK WACANA BUDAYA KEBERSIHAN DALAM PASCAKOLONIAL INDONESIA

Kees Van Dijk dan Jean Gelman Taylor (editor). *Cleanliness and Culture Indonesian Histories.* KITLV Press, Leiden. 204 hlm + indeks.

Wahyudi Akmaliah Muhammad
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PENGANTAR

Kebersihan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan sering kali menjadi prasyarat dalam pergaulan dan interaksi sosial. Seseorang dikatakan bersih bisa dilihat dari penampilan, baik itu cara berpakaian, tata krama yang dipraktikkan, maupun cara menggunakan perangkat makan, seperti sendok dan garpu, serta cara menyikapi kondisi tubuh dalam mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh (misalnya, ketika batuk, mengeluarkan dahak, ataupun bersin). Di sisi lain, kebersihan bisa menjadi penanda tingkat pendidikan seseorang, apakah ia bisa dikategorikan sebagai “modern” atau “tradisional”, berpendidikan atau kurang berpendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 180-181), kata *bersih*, secara harfiah, diartikan ‘bebas dan tidak tercemar dari kotoran, serta tidak tercampur unsur zat lain’. Sementara itu, kata *kebersihan* lebih merujuk pada ‘perihal keadaan bersih, suci, murni, dan kepercayaan manusia yang tidak mengandung noda, kotoran, ataupun dosa’. Di sini, kebersihan tidak hanya menyangkut lingkungan, tapi juga pengelolaan tubuh terkait sesuatu yang berada ataupun di dalam yang mesti dihilangkan.

Tidak ada definisi yang ketat mengenai kebersihan dan maknanya, dalam hal dan konteks apa sesuatu ataupun seseorang dianggap bersih. Alasannya, wacana kebersihan lebih menyangkut dengan cara pandang, dan bagaimana cara pandang itu dikonstruksi dan direproduksi, yang dapat membentuk pemahaman seseorang atas apa yang dianggap bersih dan kotor. Melalui mekanisme ini makna kebersihan diartikulasikan. Bagi orang yang bergaya hidup di perkotaan, misalnya, membuang ludah di sembarang tempat tidak hanya dianggap jorok, tetapi tidak berbudaya dan dianggap *kampungan*. Agar

terlihat santun dan beradab, seseorang yang membuang ludah menggunakan sapu tangan ataupun tisu, lalu disimpan di saku baju bila tidak menemukan tempat sampah. Sebaliknya, bagi orang yang hidup di pinggiran kota besar dan perdesaan, membuang ludah bisa di mana saja, asalkan tidak di dalam rumah. Alasannya, ludah adalah kotoran yang harus dibuang segera. Ia tidak terlalu memikirkan apakah tindakan itu berbudaya atau tidak. Justru, baginya, orang tidak dianggap berbudaya ketika menyimpan ludah di sapu tangan ataupun tisu lalu menyimpannya ke dalam saku. Definisi kebersihan dan posisi orang yang lebih berbudaya menjadi relatif terkait dengan cara pandang dan relasi sosial yang bersinggungan dalam memaknai kebersihan.

Untuk lebih jelas mengetahui bagaimana kebersihan dikonstruksi dan direproduksi massal, kita bisa melihat iklan produk pembersih. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, saat televisi hanya memiliki satu jaringan, TVRI, kita hanya mengenal dua produk pembersih. Sabun mandi yang digunakan untuk membasuh seluruh permukaan badan, termasuk wajah. Sabun batangan yang digunakan untuk keperluan mencuci pakaian, peralatan memasak, dan perkakas dapur. Melalui iklan televisi, kita dihadapkan pada pelbagai macam produk pembersih yang sudah terspesialisasikan. Tiap-tiap produk tersebut dianggap memiliki kegunaan untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran dan noda dari setiap anggota tubuh dan barang yang kita gunakan. Melalui dramatisasi dalam mengonstruksi kuman dan bakteri yang terdapat dalam kotoran, iklan-iklan tersebut berusaha menciptakan efek filmis untuk memengaruhi kita agar berhati-hati dan tetap menjaga kebersihan dalam situasi apa pun. Dengan visualisasi yang kuat, iklan tersebut seakan menegaskan bahwa “juru selamat” penghindar dari kotoran yang mengandung bakteri dan kuman adalah produk-produk pembersih mereka (Dovita 2011).

Penjelasan di atas adalah wacana kebersihan melalui praktik-praktik budaya populer dalam konteks kekinian, khususnya pascarezim Orde Baru. Bagaimana dengan wacana kebersihan dalam sejarah Indonesia, khususnya fase kolonial Belanda yang sangat memengaruhi watak dan budaya masyarakat Indonesia kebanyakan hingga saat ini? Buku hasil dari konferensi, dipimpin oleh Kees van Dijk dan disponsori oleh KTILV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean, Leiden, Belanda, setidaknya bisa menjawab pertanyaan itu. Buku yang terdiri dari tujuh bab, ditulis oleh akademisi Belanda dan Australia, dapat membantu pembaca memahami wacana kebersihan masa Hindia Belanda dipraktikkan dan digunakan untuk mengonstruksi atas apa yang dianggap bersih dan kotor. Selain itu, melalui buku ini, pembaca akan ditunjukkan

makna kebersihan bagi orang Indonesia kebanyakan, khususnya di daerah Jawa dan perubahan makna kebersihan dengan berkiblatnya orang-orang Barat ke dunia Timur, melalui *spa* (lulur, mandi air hangat, dan pijat refleksi).

Untuk mempermudah pembahasan tinjauan buku tersebut, *pertama*, saya akan menjelaskan terlebih dahulu studi poskolonial sebagai pijakan yang digunakan dalam mendiskusikan buku ini. *Kedua*, dinamika wacana kebersihan sebagai pembahasan utama yang membentuk identitas kelas dan ideologi. *Ketiga*, penutup, yang berisi catatan konstruktif terhadap isi buku ini dengan memberikan sejumlah masukan.

Poskolonial sebagai Pijakan

Satu negara-bangsa yang baru saja lepas dari penjajahan setidaknya memiliki dua cara dalam menyikapi fase sejarah buram. *Pertama*, mengingat kembali fase tersebut dengan mempelajari bagaimana sistem kolonial melalui kebijakan yang represif bekerja, yang membentuk pola berpikir masyarakat jajahannya hingga saat ini. *Kedua*, melupakan fase tersebut sambil menatap ke depan bahwa proses penjajahan adalah bagian sejarah yang harus dilupakan. Fase itu hanya diingat pada momen-momen tertentu yang menjadi penanda membangkitkan rasa patriotisme. Di sini, proses melakukan amnesia fase penjajahan dilakukan dengan melakukan seleksi peristiwa atas apa saja yang mesti diingat dan dilupakan. Terkait dengan Indonesia, kecenderungan yang muncul adalah tipe kedua. Alih-alih mempelajari dengan saksama apa yang terjadi pada masa kolonial Belanda terkait praktik-praktik eksploitatif dan sejumlah kebijakan yang menyengsarakan manusia Hindia Belanda, setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia, atas nama nasionalisasi aset-aset kolonial Belanda, turut melakukan amnesia sejarah. Salah satu caranya adalah dengan menganggap bahwa apa yang terjadi pada fase kolonial itu semuanya buruk. Akibatnya, selain tidak belajar terhadap masa lalu sebagai pijakan, Indonesia, dalam hal ini pemerintah, turut mempraktikkan sejumlah kebijakan dan melakukan praktik-praktik penindasan secara tidak langsung.

Penyikapan atas penjajahan itu dalam ilmu sosial humaniora disebut studi poskolonial. Maksud dari pos (*post*) di sini tidak sekadar diartikan pasca, setelah, purna ataupun periodisasi sejarah, yang mengindikasikan bahwa proses penjajahan telah selesai, digantikan dengan babak baru berdirinya sebuah negara bangsa yang berdaulat'. Kata *post* tersebut merujuk pada kontinuitas sejarah dan perubahan. Lebih jauh, poskolonial dijadikan sebagai cara untuk mengung-

kapkan adanya realitas-realitas empirik dan bentuk-bentuk representasi secara umum akibat sisa dan pengaruh warisan kolonial. Faktanya peta politik dunia telah berubah. Tak ada lagi kolonialisme melainkan dekolonisasi di belahan dunia (McLeod 2000: 33).

Sementara itu, menurut Gandhi (1998: 7), *post* di sini diartikan ‘akibat yang mengandung dua hal’. *Pertama*, sebagai faktor *sementara*, yang datang sesudahnya. *Kedua*, kata itu mengandung ideologi, yang masuk untuk menggantikan. Memang, definisi tersebut tidak bisa dijelaskan sesederhana itu. Ini menyangkut dengan konteks dan situasi yang terjadi pada sebuah negara bangsa terkait posisi ambivalensi dikotomi definisi penjajah dan dijajah, dalam hubungan budaya, ekonomi, kedaulatan politik, dan periodisasi waktu yang memungkinkan terjadinya hibriditas.

Studi ini awalnya terinspirasi karya monumental Edward Said, *Orientalism*, yang diterbitkan pada tahun 1978. Dengan menggunakan teori Michel Foucault mengenai pengetahuan/kekuasaan dan Antonio Gramsci tentang hegemoni, ia mendefinisikan ulang orientalisme, yaitu sejumlah sarjana Barat, khususnya Eropa, yang menghasilkan studi dan karya mengenai Timur. Said tidak hanya membongkar segregasi dan relasi apa yang didefinisikan sebagai Barat dan Timur, tetapi melakukan dekonstruksi atas wacana dominan yang membentuk pengetahuan, yang dihasilkan melalui karya-karya mereka (seperti sejarah, geografi, linguistik, sastra, seni, antropologi, dan bahasa), dalam memaknai, memberikan kerangka, dan memproduksi terhadap apa yang disebut dengan Timur. Alih-alih melakukan objektivikasi atas studi-studi yang dilakukan dan menempatkan informan sebagai subjek riset yang turut memengaruhi dan memberikan kontribusi, bagi Said, sejumlah sarjana Eropa tersebut memproyeksikan pelbagai kecenderungan yang tidak diinginkan oleh Eropa dalam memandang Timur. Misalnya, bagi mereka, anggapan bahwa bangsa Timur primitif, kotor, dan pemalas itu sebagai bentuk cerminan kebalikan dari Barat yang unggul, kuat, dan berperadaban. Stereotip ini tidak hanya mengakar dan bahkan, dalam beberapa hal, menjadi mitos pembenaran yang dikuatkan oleh dunia Barat dan diafirmasikan oleh sebagian besar negara bangsa Timur. Mitos dan stereotip inilah yang menjadi alasan pembenar dunia Barat, dalam hal ini Eropa, melakukan kolonisasi dan pengontrolan, yang dianggap sebagai proses pemberadaban. Proses ini dianggap bukan sesuatu yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang berjalan “alamiah”; (seolah-olah) mesti dan pasti terjadi.

Bertolak dari sini, studi poskolonial berkembang. Studi ini tidak terbatas pada kajian global relasi mengenai Barat dan Timur, tetapi juga menelaah dan menafsir ulang sejumlah kebijakan dan aspek sejarah negara-negara yang lepas dari penjajahan dan bagaimana hal itu membentuk wajah nasionalisme mereka. Ini terlihat dari teori dan kritik studi poskolonial yang marak pada tahun 1980-an di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dengan menggunakan teori Michel Foucault tentang pengetahuan/kekuasaan dan wacana, tokoh-tokoh pelopor seperti Leopold Senghor, Dominique O'Mannoni, Aime Cesaire, Frantz Fanon, dan Albert Memmi menyoroti pelbagai aspek dan dimensi pengalaman penjajahan (Budianta 2002: 49). Sementara itu, di India, studi poskolonial melahirkan kajian *subaltern* yang terinspirasi oleh salah satu teori Antonio Gramsci. Dengan memanfaatkan sekaligus mengkritik studi posmodernisme, studi ini tidak lagi terbatas pada kajian relasi penjajah-terjajah pada bekas negara jajahan, tetapi juga menjadikan perspektif ataupun pendekatan dalam membaca relasi kuasa dan produksi wacana dalam ilmu sosial dan humaniora, seperti sastra, film, sejarah, bahasa, dan budaya.

Secara spesifik, studi poskolonial adalah pendekatan pos struktural yang diterapkan pada topik khusus yang meliputi pelbagai aspek dan bidang ilmu sosial dengan menggunakan kata-kata kunci yang lahir dari teori tersebut dalam diskursus identitas. Misalnya, oposisi biner (*self and other*), ambivalensi, hibriditas, diaspora, dan otonomi kreatif. Harus diakui, teori poskolonial dalam proses kemunculannya adalah bentuk kekecewaan terhadap teori posmodernisme, terutama yang diformulasikan oleh Derrida dan Barthes. Sebagaimana ditegaskan James Snead, yang dikutip Melani Budianta (2002: 49), teori dan sastra pos modernisme telah bersalah melakukan rasialisme halus berdasarkan sikap tak acuh terhadap masalah-masalah kulit berwarna. Lebih jauh, bagi R. Radhakrishnan, teori tersebut sangat elitis metropolitan, terutama dalam konsep *difference* yang mencirikan unsur main-main sehingga memberikan kenikmatan tersendiri dan cenderung buta pada kenyataan sejarah, khususnya sejarah penindasan di Dunia Ketiga. Sebaliknya, konsep-konsep poskolonial justru dilahirkan dari penderitaan dan pengusuran identitas (Budianta, 2002: 49).

Dengan demikian, bertolak dari penjelasan di atas, selain sebagai sebuah studi dalam melihat relasi sosial yang membentuk identitas individu dan masyarakat, poskolonial adalah perspektif dan pendekatan yang meminjam ilmu-ilmu sosial kontemporer dari “Barat” untuk memandang balik ketimpangan yang dialami negara bekas jajahan, baik oleh individu, maupun masyarakat yang tertindas.

Melalui analisis “memandang-dipandang” ini, para sarjana poskolonial ingin menegaskan bahwa ada persoalan besar dalam setiap kolonialisasi, yang pengaruhnya sangat membekas dalam ingatan negara, masyarakat, dan individu yang pernah dijajah. Terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, ada dua hal yang ingin saya gunakan dalam menelaah buku *Cleaness and Culture* ini, yaitu (1) poskolonial sebagai satu kajian dalam menelaah Indonesia masa kolonial Belanda dan (2) poskolonial sebagai sebuah perspektif, digunakan dalam membaca para penulis dalam membahas kebersihan di Hindia Belanda. Kedua hal tersebut saya terapkan secara bergantian dalam dua bahasan di bawah ini.

KEBERSIHAN: KELAS, IDENTITAS, DAN IDEOLOGI

Kebersihan tidak hanya dimaknai sebagai higienitas tubuh dari pelbagai macam kotoran dan penyakit, tetapi juga pembeda dan penanda tingkat peradaban seseorang. Kondisi ini tercermin pada masyarakat Eropa dan sekitar daratan Amerika pada abad ke-19. Temuan sabun pembersih untuk badan, yang sebelumnya diperuntukkan mencuci pakaian, dipopulerkan oleh gerakan Revavilis Kristen sebagai upaya menunjukkan tingkat superioritas budaya mereka. Bagi mereka, sabun adalah prasyarat menuju modernitas. Ini terlihat dalam iklan sabun *Pears' soap* pada tahun 1890 dengan gambar laki-laki kulit hitam Afrika. Tangan kiri pria tersebut memegang tombak sebagai ilustrasi “primitif” dan tangan kanannya memegang sabun. Di bawah iklan sabun tersebut tertulis, “mengonsumsi sabun merupakan ukuran tingkat kesejahteraan, peradaban, kesehatan, dan kemurnian seseorang”. Bahkan, dalam produk Unilever, kehadiran sabun dianggap sebagai kelahiran peradaban (*The Birth of Civilisation*). Munculnya anjuran kebersihan dalam Kristen dengan doktrin kebijaksanaan, “Kebersihan itu dekat dengan nilai ketuhanan” berawal dari slogan yang digunakan oleh dunia *Anglo Saxon* dalam membujuk orang-orang miskin yang belum memiliki standar kebersihan dalam membersihkan pakaian dan badan mereka, yang dipopulerkan oleh orang Inggris, John Wesley (1703–1791).

Ditelusuri lebih jauh, ungkapan itu berasal dari ajaran Islam yang merupakan bagian dari ucapan Nabi Muhammad, “Kebersihan adalah bagian dari iman” (hlm.1–3, dan 23). Meskipun diakui, sebagaimana dicatat Kees van Dijk (hlm. 4), sabun dan bukanlah satu-satunya penanda peradaban orang Eropa. Pakaian, bahasa, dan temuan toilet adalah salah satu di antaranya. Namun, kemunculan sabun dan toilet menjadi penanda fisik yang kuat di mata orang

Eropa bahwasanya mereka dalam keadaan bersih, sebagai prasyarat bagian dari peradaban mereka. Sabun dan ide mengenai kebersihan kemudian dijadikan alat penguat rasialisme dalam membedakan diri dengan yang lain (Penjajah dan Yang Terjajah) seiring dengan munculnya kolonialisasi bangsa Eropa ke wilayah-wilayah jajahannya. Informasi ini ditemukan oleh Van Dijk dari pelbagai sumber terkait dengan ide kebersihan sebagai bagian dari kelas tinggi di masyarakat kolonial Hindia Belanda. Beberapa di antaranya adalah dari catatan Thomas Stamford Raffles, biografi buku karya Abdullah bin Abdulkadir Munshi, dan iklan harian *Bintang Soerabaia*.

Berbeda dengan Van Dijk yang membahas genealogi wacana kebersihan di Eropa sampai ke Asia Tenggara, terutama Hindia Belanda, dalam bab II (hlm. 41-60), Jean Gelman Taylor lebih menyoroti budaya mandi, aktivitas mencuci, dan higienitas di Hindia Belanda dengan menganalisis foto yang terdapat dalam arsip KITLV. Dengan menggunakan kata kunci *bathing*, *hygiene*, *washing*, *water*, dan *sanitation*, serta subanak kata dari lima kata tersebut dalam pencarian arsip *online*, ia ingin mengetahui bagaimana budaya mandi dan kebersihan itu dipraktikkan dalam masyarakat kolonial. Dari analisis temuannya, ia berpendapat bahwa banyak foto-foto yang muncul terkait erat dengan persoalan kelas, status, dan penyikapan terhadap kebersihan yang ditunjukkan dengan fasilitas yang digunakan. Bagi orang-orang Eropa dan blasteran, membersihkan badan dan melakukan kebutuhan hajat fisik, seperti buang air kecil dan besar, itu dilakukan di ruangan tertutup, yang saat ini kita kenal dengan kamar mandi atau toilet. Fasilitas privat ini juga tersedia di ruang publik. Sementara itu, bagi masyarakat kolonial, terutama “pribumi” mereka melakukan aktivitas membersihkan badan dan kebutuhan cuci-mencuci itu di ruang terbuka, sungai. Dengan kata lain, pembagian ruang ini ingin menunjukkan bahwa orang Eropa dan *blasteran* harus dijauhkan dari orang “pribumi” yang dianggap kotor dan tidak tahu mengenai kebersihan.

Meskipun begitu, klasifikasi kelas sosial dalam budaya mandi dan kebersihan ini juga dipraktikkan di kalangan “pribumi” sendiri. Melalui hasil jepretan Kasian Cephas, kamerawan Jawa abad ke-19, terlihat bahwa kelas elite pribumi tidak terlihat mandi dan mencuci di sungai, bahkan mereka tidak terlihat melakukan aktivitas mandi di tempat pemandian yang sudah dibuat. Foto-foto yang terdapat dalam arsip KITLV Leiden ini juga membuktikan bahwa pembagian konsep ruang privat dan publik yang kita kenal saat ini, sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat “pribumi”. Hal ini beriringan dengan temuan teknologi mencuci (seperti toilet dan sanitasi) di Eropa yang memungkinkan

untuk melakukan privatisasi pelbagai aktivitas dalam menjaga kebersihan. Dalam bab ini, Taylor juga menegaskan, superioritas peradaban kolonial Belanda itu salah satunya ditunjukkan dengan tetap menjaga budaya dan gaya hidup mereka seiring dengan dibukanya Hindia Belanda untuk perusahaan swasta dan para imigran yang ingin mencari penghidupan lebih layak. Ini ditunjukkan dengan adanya kursus kepribadian dan aktivitas mencuci di *the Colonial School for Women and Girls*, didirikan pada tahun 1920 di Hague. Materinya antara lain, bagaimana cara makan dengan sendok dan garpu, adanya buku petunjuk untuk mengganti pakaian setiap hari, dan membersihkan badan di ruang privat, kamar mandi. Kursus ini kebanyakan ditujukan untuk perempuan dan ibu rumah tangga yang akan menjadi penyangga budaya kebersihan di Hindia Belanda (hlm. 46).

Dalam bab III (hlm. 62–93), Mary Somers Heidhues mendiskusikan endemik penyakit beri-beri dengan mengambil studi kasus di Bangka-Belitung, antara tahun 1850-an dan 1914. Dalam sejarah, penyakit beri-beri memang sudah ada sejak lama, tepatnya pertengahan abad ke-17. Di beberapa negara penyakit itu dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Penyakit menyebar ini biasanya terjadi di negara tropis, khususnya masyarakat yang penganan utamanya adalah beras. Meskipun menular, beri-beri tidak membahayakan. Cukup dengan istirahat, orang akan sembuh dengan sendirinya. Beri-beri menjadi persoalan besar dunia terjadi pada abad ke-19. Alasannya, penyakit tersebut tidak hanya menyerang orang-orang dengan kekurangan gizi, hidup dalam lingkungan yang miskin dan kumuh, tetapi juga orang yang sehat dengan gizi yang bercukupan. Di Hindia Belanda, pengobatan dan pencegahan yang dilakukan adalah dengan memberikan nutrisi yang cukup melalui buah-buahan, tambahan vitamin dan daging, serta melakukan diet terhadap nasi. Usaha yang dilakukan dari hasil riset C. Eijkman ini cukup berhasil. Ini ditandai dengan tidak adanya orang yang meninggal akibat penyakit tersebut.

Yang terjadi di Bangka dan Belitung sebaliknya. Masyarakat kolonial, terutama mereka yang bekerja sebagai buruh tambang, banyak yang meninggal. Tampaknya, selain karena faktor kemiskinan, kekurangan gizi, buruknya sanitasi, pola kehidupan yang tidak sehat, persoalan utama di Bangka dan Belitung itu lebih pada adanya pengolahan beras yang salah sebelum ditanak. Riset ini dilakukan oleh C. Eijkman dan dibantu dua peneliti dari Utrecht, C.A. Pekelharing dan C. Winkler. Selain mengubah pola makan dan manajemen kehidupan yang buruk, dan ide mengisolasi, mereka mengusulkan agar para buruh, kebanyakan dari Cina dan Singapura, mengonsumsi nasi merah

yang dikirim dari Jawa. Hasilnya cukup signifikan. Para buruh yang meninggal lebih dari 2% pada tahun 1906–1908 turun menjadi 1% pada tahun 1912–1913. Beri-beri pun tidak lagi menjadi penyakit mematikan. Namun, menurut Mary, ada persoalan mendasar dalam cara mendiagnosis mereka yang sakit. Alih-alih bersikap dingin dalam mencari sebab-sebab utama dalam melakukan riset dan analisis untuk mengobati dan mencegah wabah beri-beri, aparat kolonial Belanda secara formal mencatat bahwa beri-beri bukan hanya persoalan dari luar tubuh manusia, melainkan karena faktor manusia itu sendiri, yang pada dasarnya bersikap dan berpola hidup kotor (hlm. 88–89). Di sini, viktimisasi orang Cina sebagai bagian dari munculnya penyakit beri-beri memperteguh sikap dan kebijakan rasisme dalam pikiran pemerintah kolonial dalam memandang dan memperlakukan masyarakat kolonial.

Dengan menggunakan sumber informasi dan data dari Eropa, terutama Belanda, David Henley menjelaskan mengenai kondisi higienitas, kesehatan, dan tempat tinggal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di daerah Sulawesi Utara (Manado, Gorontalo, dan Minahasa), yang masuk dalam wilayah kekuasaan Belanda dalam bab IV (hlm. 94–116). Menurutnya, banyak sekali komentar dan pendapat yang bernada menyalahkan dengan menganggap menyebarnya penyakit menular di masyarakat kolonial disebabkan oleh praktik kebiasaan budaya kotor dan tak sehat. Tetapi, apakah benar penyebaran penyakit semacam malaria, disentri, kolera, dan penyakit kulit lainnya disebabkan praktik kebiasaan yang mereka lakukan, yang dianggap kotor di mata aparat kolonial? Jauh sebelum adanya budaya higienitas dan kebersihan terkait dengan awal-awal modernitas Eropa, masyarakat prakolonial Hindia Belanda, khususnya Sulawesi Tenggara, secara substansif, sudah mengenal budaya kebersihan. Alasannya, mereka sudah menggunakan air untuk mandi dan mencuci yang memungkinkan mereka bisa terbebas dari kotoran dan kuman. Stereotip budaya tak bersih yang dipraktikkan oleh masyarakat kolonial ini merupakan bentuk propaganda sebagai bentuk penguatan diri bahwa orang Eropa itu lebih beradab ketimbang mereka. Dengan posisi diri yang (di)lemah(kan) ini, masyarakat kolonial harus mengikuti keinginan mereka agar siap di-peradab-kan melalui sejumlah regulasi. Meskipun diakui, selain persoalan letak geografis tempat tinggal masyarakat kolonial yang berada di dataran tinggi, mereka dihadapkan pada ketiadaan teknologi sanitasi sehingga menyusahkan mengakses air bersih untuk dikonsumsi. Tidak adanya konsep ruang privat, menyebabkan mereka melakukan aktivitas apa pun bersama di dalam rumah. Hal itu mempercepat sebaran sebuah penyakit. Adanya regu-

lasi untuk mengisolasi mereka yang terkena penyakit menular, diterapkannya sanitasi, dan penggunaan sandal di kalangan masyarakat kolonial memang memungkinkan berkurangnya pelbagai macam penyakit menular tersebut. Tidak hanya itu, penggunaan sabun, bagi David, juga sebagai bentuk membangun budaya kebersihan publik yang diwariskan kolonial Belanda.

Berbeda dengan empat tulisan di atas yang mengacu definisi kebersihan terkait dengan fisik dan lingkungan, Marieke Bloembergen menyelidik definisi tersebut lebih bersifat politis dan metaforis, terutama persoalan moral publik yang menyangkut peradaban dan higienitas orang Eropa di Hindia Belanda pada tahun 1930-an. Dalam bab V (hlm. 117–145), ia mengambil studi kasus peranan kepolisian sebagai garda depan proyek kebersihan moral dalam “membersihkan” orang-orang yang memiliki perbedaan orientasi seksual, yaitu homoseksual. Bagi pemerintah kolonial Belanda, mereka yang memiliki perbedaan orientasi seksual tidak hanya dianggap kotor, yang dapat memunculkan penyakit kelamin menular, tetapi juga merusak kemurnian dan peradaban budaya yang sudah dipraktikkan sekian lama. Homoseksual juga dianggap menunjukkan “lemahnya” wajah peradaban orang Eropa. Sebaliknya, heteroseksual menjadikan bangsa Eropa kuat di mata masyarakat kolonial. Oleh karena itu, untuk memperkuat identitas budaya, higienitas, dan peradaban orang Eropa, dibentuklah satuan kepolisian sebagai aparatus penjaga moral dan kesopanan publik. Satuan kepolisian ini yang nantinya menjadi cikal bakal kepolisian modern sebagai alat kontrol politik dan keamanan masyarakat sipil. Di antara satuan kepolisian tersebut adalah polisi administratif yang dibentuk pada abad ke-19, polisi kota pada tahun 1911–1914, dan polisi lapangan yang menggunakan mobil bak terbuka dengan sirene, ditugaskan untuk mengawasi dan mengontrol daerah-daerah perdesaan. Dengan didukung jurnalis kolonial sebagai pembenar melalui berita-berita yang diterbitkan, aparatus inilah yang bertugas mengawasi, menyelidiki, dan menangkap mereka yang dituduhkan tidak bersih diri dengan memiliki kecenderungan suka terhadap sesama jenis. Hal ini terlihat dengan adanya penangkapan 225 orang Eropa dengan tuduhan sebagai homoseksual pada tahun 1938 dan 1939. Mereka yang ditangkap ada yang berasal dari pelayan publik senior kolonial. Dengan demikian, menurut Bloembergen, hampir semua media massa saat itu memiliki bahasa yang sama dalam menyikapi penangkapan tersebut, yakni kebersihan dan higienitas dalam menjaga kemurnian orang Eropa itu penting dengan menjauhkan diri dari orientasi seksual. Kondisi reproduksi pengawasan dan kecurigaan terkait kebersihan moral diri ini mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 1965 dan

1998, yakni pemerintah otoriter Orde Baru sukses dalam memberikan definisi bersih diri dengan makna metafor tertentu. Praktik metafor menggunakan stigma PKI kepada orang lain ini yang memungkinkan setiap orang bisa memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan ambisi politik-ekonominya.

Dengan pendekatan etnografi dan metodologi partisipatori riset, George Quinn menelaah tradisi mandi (*padusan*) sebagai proses ritual keagamaan dalam budaya Jawa. Ritual *padusan* dan upacara ritual dengan melakukan aktivitas keramas adalah momen transisi yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama manusia Jawa. Momen transisi itu adalah kelahiran, pernikahan, dan kematian. Di sini ritual membersihkan badan tidak hanya berguna untuk menghilangkan kotoran, noda, dan pelbagai macam penyakit, tetapi juga memiliki dampak secara spiritual, yaitu menyucikan fisik dan batin dari dosa yang diperbuat. Dampak inilah yang kerap tak bisa didefinisikan oleh dunia modernitas Barat, dalam hal ini Eropa, dalam melakukan rasionalitas atas apa yang disebut bersih dan kotor. Dalam bab VI (hlm. 148–157) ini, dengan cukup baik, Quinn mendiskusikan makna kebersihan dalam tradisi Jawa dengan ragam istilah dan konteks kapan *padusan* dan *kramas* itu dipraktikkan, serta persyaratan apa saja yang mesti dipenuhi. Selain itu, ia juga menjelaskan perubahan praktik-praktik keramas seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, yaitu mereka menginginkan sesuatu serba cepat dan instan. Akibatnya, originalitas praktik ritual itu sudah jauh berkurang. Kini masyarakat tidak lagi menggunakan *merang* (padi yang dibakar dan airnya digunakan untuk keramas), tetapi bisa membeli produk sampo *merang* di supermarket. Ritual keramas dan *padusan* pun sudah menjadi atraksi wisata untuk mendatangkan wisatawan. Meskipun terjadi perubahan, tradisi tersebut masih dipraktikkan. Ini bisa dilihat dari sejumlah perempuan Muslim berjilbab yang masih mempraktikkan tradisi keramas saat melakukan seremoni pernikahan, dengan tidak memperlihatkan rambutnya. Bagi Quinn, pada satu sisi, hal itu menunjukkan satu upaya menjaga tradisi. Pada sisi lain, hal itu sebagai bentuk ketaatan sebagai bagian dari komunitas Muslim untuk menjaga “aurat” mereka di ruang publik.

Dalam bab terakhir (hlm. 159–192), Bart Barendregt mendiskusikan munculnya fenomena *spa* (luluran, mandi air hangat, yoga, dan pijat) di Asia. Dalam sejarah, awal kali kemunculan *spa* bisa dilacak di Eropa pada abad ke-13 dan menjadi tren pada zaman *Renaissance* abad ke-15, terutama di Inggris dan Italia. Pada pertengahan abad ke-17, *spa* dan tempat tetirah (*resort*) menjadi gaya hidup kelas borjuis orang Eropa. *Spa* menjadi komersial dan komoditas

ekonomi pada abad ke-19 seiring dengan adanya orang kaya baru, budaya *kongkow* (*leisure/waktu luang*) yang diekspor ke Amerika Serikat. Ini ditandai dengan munculnya *resort spa* pada tahun 1826 di Saratoga, New York, menggunakan nama *Mohawk* yang merujuk pada “air pengobatan” yang digunakan orang Indian. *Spa* menjadi industri modern pada tahun 1970-an dan mengalami revolusi besar-besaran pada tahun 1990-an berbarengan dengan maraknya pengobatan dan pijat ala negeri Cina. Di sini, Thailand menjadi negara Asia pertama yang membuka *resort* yang kemudian diadopsi oleh negara-negara Asia lainnya, khususnya negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Salah satu cara memopulerkan *spa* Asia ke dunia internasional adalah dengan membuat buku pegangan yang disebar di kafé-kafé dan tempat publik di Eropa dan Amerika Serikat. Tak ketinggalan, sosialisasi iklan melalui situs-situs di dunia maya terkait dengan paket-paket yang ditawarkan dengan menjanjikan pesona dunia Timur, seperti keindahan, kecantikan, dan kesehatan di tengah budaya waktu senggang/*kongkow* yang dibutuhkan. Bagi Barendregt, fenomena ini disebut dengan “gaya hidup Asia baru” (*Lifestyle of New Asianism*), yang merupakan temuan kembali khazanah klasik dalam pengobatan dan kesehatan. Maksud asianisme ini tidak merujuk pada makna anti Barat ataupun merepresentasikan antiimperialisme. Asianisme diartikan sebagai “pasar” dan identitas ke-asia-an sebagai komoditas sirkulasi global melalui jalan kapitalisme. Sementara itu, faktor utama mengapa industri *spa* berkembang secara cepat, yang dapat menarik wisatawan Amerika Serikat dan Eropa untuk berkunjung ke Asia, adalah karena industri ini merupakan bagian dari budaya populer sebagai bagian dari aktivitas *kongkow*. Selain itu, *spa* adalah diplomasi halus dalam bentuk produk budaya yang relatif kurang memiliki dampak muatan politik. Apalagi, selain melalui pemerintah, industri ini digerakkan oleh banyak pihak, yaitu akademisi, seniman, dan pelaku industri lainnya.

PENUTUP

Dengan membaca keseluruhan buku ini, kita bisa mengerti bagaimana kolonial Belanda memaknai dan mempraktikkan makna kebersihan di Hindia Belanda. Di sini kebersihan tidak sekadar dimaknai mencuci pakaian, membersihkan badan dari kotoran, dan budaya bersih agar terhindar dari ragam penyakit, tetapi merupakan salah satu cara menjaga higienitas peradaban bangsa Eropa di tanah jajahannya agar tidak terkontaminasi. Cara ini tidak hanya menunjukkan perasaan superioritas bangsa Eropa, tetapi juga memungkinkan terbentuknya imajinasi pada masyarakat kolonial bahwa budaya kebersihan yang dipraktik-

kan itu menunjukkan tingginya peradaban pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, ketujuh artikel dalam buku ini menyiratkan bahwa kolonialisasi di Hindia Belanda tidak hanya berkaitan erat dengan proses eksploitasi masyarakat kolonial, sebagaimana sering dibahas oleh sejumlah intelektual melalui buku-buku, artikel, ataupun laporan, melainkan juga ada upaya proses pemberadaban masyarakat kolonial. Proses pemberadaban sebagai sesuatu yang dianggap alamiah dan berlaku di mana saja inilah yang sekarang menjadi praktik budaya kebersihan yang kita nikmati dari warisan kolonial Belanda. Ini dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup modernitas Indonesia saat ini. Misalnya, menggunakan sendok dan garpu ketika makan, memiliki kenyamanan buang air besar dengan toilet duduk, dan cenderung menyukai melakukan aktivitas mandi dan mencuci pakaian di dalam rumah ketimbang di sungai, meskipun hidup di wilayah perdesaan. Di sisi lain, tradisi-tradisi lokal seperti *padusan* dan keramas pada momen-momen penting hari raya keagamaan ataupun seremoni personal keluarga, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian sebagai bagian dari upacara daur hidup, tidak lagi menjadi praktik budaya masyarakat perkotaan. Tradisi itu dipraktikkan sebagai bagian dari aksesoris gaya hidup masyarakat urban. Ini mengingatkan betapa pelbagai persyaratan dan aktivitas yang mesti dilakukan. Budaya pragmatisme seperti ini juga mulai masuk ke wilayah-wilayah perdesaan.

Bertolak dari penjelasan setiap bab dari buku ini, ada sejumlah catatan konstruktif yang dapat saya berikan terkait dengan titik lemah dalam argumentasi dan penjelasan mengenai wacana budaya kebersihan pada masyarakat kolonial Belanda, yang kini menjadi Indonesia. *Pertama*, tidak adanya pembahasan makna kebersihan dalam konteks peristiwa 1965–1966. Dari segi tema, buku ini cukup beragam dalam membahas praktik budaya kebersihan, baik itu fase Hindia Belanda maupun Indonesia masa kini dengan membahas tradisi *padusan* dan keramas dalam budaya Jawa dan fenomena *spa* di Asia, termasuk di Indonesia dengan sejumlah produk kesehatan dan kecantikannya, dan Bali, yang secara geografis sebagai surga *spa*. Namun, buku ini tidak membahas praktik budaya bersih dalam tahun-tahun tergelap sejarah Indonesia pada masa rezim Orde Baru selama 32 tahun. Meskipun dibahas, itu hanya tiga kalimat yang dijadikan contoh terkait dengan stereotip homoseksual dalam bab V yang dibahas oleh Marieke Bloembergen dan dikuatkan oleh Kees van Dijk dan Jean Gelman Taylor dalam kata pengantar. Definisi kebersihan, dalam hal ini bersih diri, pascaperistiwa 1965–1966, yang berakibat dibunuhnya 500.000–1 juta orang Indonesia atas nama PKI dan di-PKI-kan serta dijebloskannya mereka tanpa proses pengadilan terlebih dahulu, menjadi momen-momen sejarah pen-

ting untuk dibahas. Sebagaimana dijelaskan oleh Teruo Sekimoto (2005: 489), kata *bersih* pertama kali disetujui oleh pemerintah Orde Baru yang merujuk pada bebas dari pengaruh komunis. Jika seseorang dikatakan *tidak bersih*, ini secara tidak langsung menyatakan latar belakang politik tertentu, yaitu PKI. Meskipun kata itu tidak bergeser maknanya hingga tumbangannya rezim Orde Baru, pada tahun 1970-an dan 1980-an makna *bersih* juga merujuk pada hal fisik, yaitu tentang kebersihan fisik desa dan kota, yang sering dipasangkan dengan slogan-slogan serupa, seperti *sehat, nyaman, aman, dan tertib*.

Kedua, luasnya definisi kebersihan. Dalam buku ini, kebersihan tidak didefinisikan dengan ketat sehingga memungkinkan para penulis untuk membahas praktik-praktik kebersihan di Indonesia melalui sudut pandang yang diinginkan dengan mengajukan studi kasus (lihat, Hatib Abdul Kadir, 2012). Satu sisi, cara ini dapat membantu memperluas informasi, data, dan perspektif dalam melihat praktik kebersihan yang diartikulasikan dalam ruang publik Indonesia. Di sisi lain, hal itu dapat mengaburkan keseluruhan dari isu buku yang dapat membingungkan dan menyesatkan pembaca. Beberapa contoh analisis bahasan yang terlalu jauh dari kerangka definisi kebersihan adalah artikel yang ditulis Mary Somers Heidhues dalam bab III, dan David Henly bab IV. Walaupun diakui, dalam kata pengantar, Kees van Dijk dan Jean Gelman Taylor berusaha memberikan kerangka dalam buku ini, yaitu sebagai bagian dari tren baru dalam melibatkan sejarah persepsi (*history sensory*) dalam kajian Asia Tenggara. Meskipun temanya sama, pilihan topiknya pun bisa beragam dengan mengambil pelbagai data dan informasi yang dapat dianalisis dalam kajian ilmiah. Meskipun sudah diberikan kerangka tulisan agar artikel-artikel dalam buku ini bisa lebih mudah dipahami, bagi saya, pembaca dituntut lebih keras untuk konsentrasi dalam mengikuti alur setiap pembahasan setiap bab buku tersebut.

Ketiga, relatif minimnya perspektif poskolonial dalam setiap bab pembahasan. Dalam buku ini, para penulis tidak memberikan ketegasan sikap dalam perspektif yang digunakan untuk membaca data dan informasi yang didapatkan. Meskipun demikian, dalam analisis yang digunakan, nuansa studi poskolonial cukup kental. Hal ini bisa dilihat dengan adanya aspek sikap kritis yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda atas sejumlah kebijakan yang dipraktikkan, sebagaimana saya jelaskan dalam subbahasan tulisan ini sebelumnya. Namun, ketidaktegasan sikap dalam menggunakan perspektif ini berakibat pada relatif kurang artikulatifnya sebuah tulisan dalam analisis pembahasan pada buku ini. Satu contoh yang bisa diangkat adalah tulisan Jean

Gelman Taylor dalam bab II, yang menyoroti budaya mandi, aktivitas mencuci, dan higienitas di Hindia Belanda melalui foto-foto yang terdapat dalam arsip KITLV. Melalui foto-foto tersebut, sebenarnya dapat dianalisis lebih dalam dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Sejauh mana relasi antara penjajah dan yang terjajah dalam masyarakat kolonial dalam kaitannya dengan kebersihan? Bagaimana representasi orang Eropa terkait dengan kolam renang di tengah masyarakat kolonial yang melakukan aktivitas mandi dan mencuci di sungai? Apa pendapat dan pengalaman dari penulis sendiri sebagai orang yang mengkaji Indonesia, yang berasal dari Australia dalam melihat foto-foto tersebut? Sejumlah pertanyaan tersebut merupakan tawaran reflektif dan usaha mendekonstruksi diri penulis yang memungkinkan memiliki cara pandang bias dalam membaca, menganalisis, menyimpulkan data, dan informasi pada masyarakat kolonial. Apalagi, data dan informasi yang didapatkan pada masa kolonial memiliki kecenderungan untuk mengontrol dan menjinakkan masyarakat jajahannya.

Keempat, tidak adanya penulis dari Indonesia atau Asia Tenggara yang memungkinkan memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan data dan informasi mengenai wacana kebersihan tersebut. Pendapat ini mungkin terkesan esensialis, yakni penulis yang berasal dari negara tertentu memiliki cara pandang khusus terkait dengan kajian yang dilakukan. Misalnya, orang Indonesia memiliki kemampuan subjektivitas yang lebih baik dalam melakukan studi mengenai negaranya. Padahal, sebagaimana diketahui, justru kajian mengenai Indonesia yang memiliki bobot internasional justru dihasilkan oleh orang non-Indonesia. Kalaupun ada orang Indonesia yang menghasilkan kajian Indonesia dengan cukup baik, hal itu biasanya dikerjakannya di luar negeri. Hal ini mengingat berlimpahnya data, informasi, dan sumber-sumber primer yang bisa didapatkan, serta pembimbing yang tekun memberikan arahan dalam diskusi. Tujuan saya mengajukan pendapat seperti ini adalah, dengan adanya penulis yang berasal dari Indonesia ataupun Asia Tenggara, agar memungkinkan terciptanya otonomi kreatif dalam memandang relasi antara penjajah dan terjajah. Di sini, masyarakat terjajah tidak hanya menerima dengan pasif regulasi dan kebijakan praktik kebersihan di Indonesia, tetapi turut memberikan kontribusi melalui kebudayaan lokal yang dimiliki dalam membentuk wacana kebersihan di Hindia Belanda. Contohnya adalah dengan adanya frekuensi mandi sehari dua kali yang dilakukan oleh orang Eropa di Hindia Belanda mengikuti budaya masyarakat kolonial, mengingat iklim tropis yang harus mereka hadapi. Ini berbeda bila mereka berada di Eropa. Mandi

bisa jadi bukanlah suatu aktivitas rutin yang harus dijalankan. Di sisi lain, disadari ataupun tidak, para penulis non-Indonesia, terutama Amerika Serikat dan Eropa yang dididik bertahun-tahun dengan sistem pendidikan “barat”, memiliki “pelebagaan subjektivitas” yang dibentuk oleh negara. Subjektivitas yang terlembaga ini memiliki kecenderungan bias dan adanya sensor diri (*self-censorship*) dalam memandang masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia. Dengan demikian, dugaan kuat saya, ketidaktegasan menggunakan konsep poskolonial, adalah satu upaya sensor diri dalam mengkaji Indonesia, khususnya masyarakat Hindia Belanda.

Terlepas dari catatan konstruktif tersebut, keseluruhan artikel dalam buku ini memberikan kontribusi dalam studi poskolonial Indonesia dengan mengkaji hal-hal yang sepele tetapi turut memengaruhi pola dan budaya masyarakat Indonesia hingga kini, yaitu praktik wacana budaya kebersihan. Selain itu, melalui paparan dalam setiap bab artikel, buku ini menegaskan bahwa persoalan kebersihan tidak hanya melulu mengenai tubuh yang didisiplinkan, rumah, pakaian, dan lingkungan yang diatur menjadi lebih baik, tetapi juga adanya semacam ideologisasi negara yang dibenamkan melalui sejumlah regulasi untuk mengatur, membina, dan juga menjinakkan atas apa yang dianggap bersih dan kotor. Hal ini sering kali dengan penggunaan bahasa dan simbol tertentu dengan tujuan politis. Buku ini juga bisa dijadikan pegangan bagi siapa pun yang ingin mengkaji sejarah Indonesia dengan topik-topik yang berbeda, sederhana dan remeh-temeh, tetapi justru memengaruhi watak kebudayaan masyarakat Indonesia hingga kini.

PUSTAKA ACUAN

- Abdul Kadir, Hatib. 2012. “Budaya Kebersihan dalam Sejarah Indonesia”, dalam *Review Buku Cleanliness and Culture Indonesian Histories* (ed. Kees van Dijk dan Jean Gelman Taylor, 28 Februari 2012, <http://ethohistori.org/budaya-kebersihan-dalam-sejarah-indonesia-review-hatib-abdul-kadir.html>, diakses 9 November 2012.
- Budianta, Melani. 2002. “Teori Sastra Sesudah Strukturalisme: Dari Studi Teks ke Studi Wacana Budaya”. PPKB LPUI dalam Pelatihan Teori dan Kritik Sastra, PPPG Bahasa 27-30 Mei 2002.
- Dovita, Maria. 2011. “Kotor itu Duit: Cerita Soal Produk Pembersih di Televisi”, <http://remotivi.or.id/pendapat/kotor-itu-duit>, dikutip 1 November 2012
- Leela, Gandhi. 1998 . *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*. St. Leonards: Allen & Unwin.

BIODATA PENULIS

Ahmad Helmy Fuady

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menyelesaikan pendidikan S1 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2000 dan S2 bidang *International Development and Economics*, dari the Australian National University tahun 2005. Pada tahun 2012 memperoleh gelar doktornya dari Universiteit van Amsterdam, Belanda, setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul, *Elites and Economic Policies in Indonesia and Nigeria, 1966–1998*. Minatnya adalah pada kajian-kajian ekonomi dan pembangunan, baik dalam tataran lokal maupun global. E-mail: elhelmy@yahoo.com

Firman Noor

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Menulis beberapa artikel di beberapa laporan penelitian, media massa, dan jurnal, baik nasional maupun internasional, mengenai partai politik dengan berbagai sudut pandang. Menyelesaikan program doctoral di University of Exeter, Inggris, dengan judul disertasi *Institutionalizing Islamic Political Parties: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Reform Era*. Saat ini penulis juga merupakan dosen di almaternya, Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. E-mail: firman.noor@yahoo.co.id

Heru Cahyono

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sarjana dari Ilmu Politik FISIP UI ini pernah menjadi wartawan (1991–1999). Karya yang telah dipublikasikan antara lain, *Peranan Ulama dalam Golkar: dari Pemilu sampai Malari* (Sinar Harapan 1992), *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74* (Sinar Harapan 1998). ia, juga menjadi kontributor pada buku *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Sinar Harapan 1998), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Yayasan Obor Indonesia 1998), *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997* (Yayasan

Obor Indonesia 1999), *Tentara Mendamba Mitra* (Mizan, 1999), *Tentara yang Gelisah* (Mizan 1999), *Soemitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*, (Sinar Harapan 2000), *Kerusuhan Sosial di Indonesia* (Grasindo 2001), *Konflik Antar Elit Politik Lokal* (Pustaka Pelajar 2005), *Konflik Elite Politik di Pedesaan* (Pustaka Pelajar 2005), *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Pustaka Pelajar 2006), *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergolak* (Pustaka Pelajar 2008), *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* (Pustaka Pelajar 2008). E-mail: alii_pjm@yahoo.com.

Kurniawati Hastuti Dewi

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta. Penelitian yang menjadi fokus kajiannya adalah gender dan politik, politik kebijakan sosial, serta Islam dan demokratisasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Penulis memperoleh gelar master dalam bidang Studi Asia (spesialisasi Asia Tenggara) dari the Australian National University (ANU), Canberra pada tahun 2007. Penulis baru saja menyelesaikan studi S3 dalam bidang Studi Kawasan (*Area Studies*) dari Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS) Kyoto University, Jepang tahun 2012, dengan disertasi tentang kemunculan para bupati perempuan Muslim di tingkat lokal sejak berlakunya pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005. Selain aktif menulis artikel di berbagai jurnal internasional, penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah internasional sebagai presenter dalam konferensi internasional dan pelatihan internasional khususnya dalam bidang gender dan politik. Beberapa publikasinya dalam jurnal internasional di antaranya adalah “Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century”, *Southeast Asian Studies* Vol. 01, No. 01 (April 2012); dan “Perspectives Versus Practices: Women’s Leadership in Muhammadiyah”, *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 23/2 (October 2008). E-mail: kurniawati.dewi@yahoo.com

Mardyanto Wahyu Tryatmoko

Peneliti pada Bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik (P2P), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Setelah bergabung dengan LIPI pada tahun 2002, Mardyanto aktif melakukan penelitian di bidang konflik dan otonomi daerah. Pada tahun 2009, ia mendapatkan dua gelar master

yaitu dari Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, dan Economic, Planning, and Public Policy Program (EPP), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang. E-mail: mardyanto@gmail.com

Muhamad Hisyam

Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Memperoleh gelar doktor dari Leiden University dengan judul disertasi *Caught Bertween Three Fires, The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882–1942*. Bidang peminatannya adalah sejarah dengan kekhususan sejarah kebudayaan Islam. Selain meneliti ia juga mengelola jurnal ilmiah *Masyarakat dan Budaya* sebagai ketua editor. Menjadi mitra bestari dari banyak jurnal ilmiah dari berbagai lembaga penelitian. Mengajar di sekolah pascasarjana Universitas Nasional dan Program Pascasarjana Institut PTIQ. E-mail: muhlisyam@yahoo.com.

Muridan Satrio Widjojo

Bekerja di LIPI sejak tahun 1995. Sejak 2008 Muridan memimpin tim kajian Papua dan sejak 2010 menjadi koordinator bersama Jaringan Damai Papua (JDP) yang bekerja secara sukarela memfasilitasi persiapan dialog antara masyarakat Papua dan Pemerintah. Sejak akhir 2010 doktor sejarah politik lulusan Universitas Leiden Belanda 2007 ini terpilih menjadi Kepala Bidang Politik Lokal di P2P LIPI. Peneliti alumnus UI (Magister Antropologi FISIP UI dan sarjana Fakultas Ilmu Budaya UI) ini juga menjadi pengajar tidak tetap dan membimbing mahasiswa S3 di FIB UI. Sebagai peneliti, dia dikenal sebagai spesialis Papua (dan Maluku). Minat penelitian yang sekarang ini dikembangkan adalah sejarah lokal, politik lokal, konflik dan pembangunan perdamaian, serta pengembangan indeks demokrasi lokal. E-mail: muridanwidjojo@gmail.com.

Purnawan Basundoro

Meraih pendidikan sarjana (S1) dari Universitas Gadjah Mada tahun 1996, pascasarjana (S2) di universitas yang sama, dan doktor (S3) juga di Universitas Gadjah Mada dalam bidang ilmu sejarah. Pada akhir tahun 2009 sampai tahun 2010 mengikuti program sandwich-like di Negeri Belanda untuk melengkapi data-data disertasi. Saat ini bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya. Buku yang

pernah ditulis antara lain: Mengawal Lembah Serayu: Polres dan Kapolres Banjarnegara sampai Tahun 2007, (Ar-Ruzz Media, 2007); Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan, (Ombak, 2009); Melayani Rakyat Menjaga Negara: Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia (Persero), (PT Pos Indonesia dan LSPEU Indonesia, 2011); Pengantar Ilmu Sejarah, (Ombak, 2012); Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906–2012), (Departemen Ilmu Sejarah Unair dan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, 2012). E-mail: pbasundoro@yahoo.com.

Tuswoyo

Dosen PNS yang dipekerjakan di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lulusan Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Indonesia tahun 2012. E-mail: tuswoyoadmojo@yahoo.co.id.

Wahyudi Akmaliah Muhammad

Peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI. Ia menyelesaikan studi S2 di dua jurusan yang berbeda, Kajian Budaya (2008), Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan *International Peace*, University for Peace, Costa Rica (2010). Salah satu karyanya yang diterbitkan menjadi buku adalah *Menggadaikan Ingatan: Politisasi Islah di Kalangan Korban Priok* (2009). E-mail: wahyudiakmaliah@gmail.com.

Wawan Ichwanuddin

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Menyelesaikan studi S-1 dan S-2 di Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Bidang kajian yang diminati adalah partai politik, pemilu, demokratisasi, dan politik lokal. Selain menjadi peneliti di P2P LIPI, ia juga aktif menjadi pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Saat ini menjadi koordinator kelompok survei Program Kajian Pemilu P2P LIPI. E-mail: wichwanuddin@yahoo.com.